

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografi Kabupaten Cirebon

1) Letak Wilayah Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon, merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Tengah. Dalam sektor pertanian Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah produsen beras yang terletak dijalur pantura.

Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak disepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi.

2) Batas Wilayah Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon berada di daerah pesisir Laut Jawa. Berdasarkan letak geografisnya, batas wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 6°30' – 7°00' Lintang Selatan dan 108°40' - 108°48' Bujur Timur. Bagian utara merupakan dataran rendah, sedang bagian barat daya berupa pegunungan, yakni lereng Gunung Ciremai. Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Wilayah Kabupaten Cirebon dibatasi oleh :

- a. Utara Kabupaten Indramayu
- b. Barat Laut Kabupaten Majalengka
- c. Selatan Kabupaten Kuningan
- d. Sebelah Timur Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon. Tiga kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2007 adalah Kecamatan Jamblang (Pemekaran Kecamatan Klangeran sebelah timur), Kecamatan Suranenggala (Pemekaran Kecamatan Kapetakan sebelah selatan), dan Kecamatan Greged (Pemekaran Kecamatan Beber sebelah timur).

3) Wilayah Administratif Kabupaten Cirebon

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah kabupaten Cirebon berkewenangan untuk mengelola perairan pesisir dalam zona 0-4 mil dari garis pantai. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Cirebon seluas 399.6 Km² (54km x 4mil x 1.85km).

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

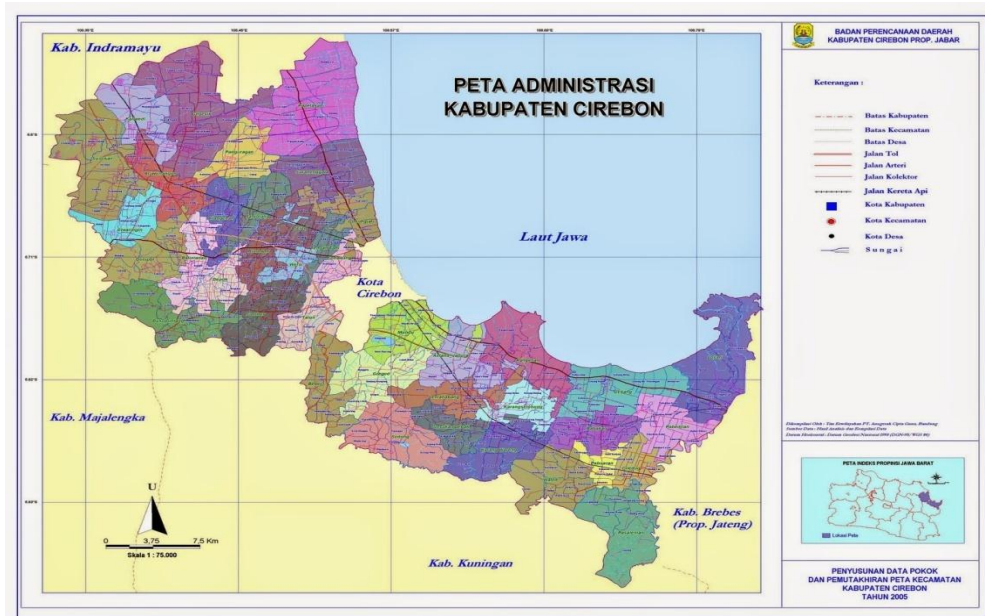
Sebelah Utara : Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat Laut: Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1 Peta kabupaten Cirebon



Sumber: Bappeda Kabupaten Cirebon 2015

Berdasarkan geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (geostrategic) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini.
- b) Wilayah Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota di sekitar Cirebon.

- c) Wilayah Kabupaten Cirebon menjadi lintasan ruas jalan bebas hambatan (jalan Tol) yakni ruas jalan tol Cikampek-palimanan (Cikapa), ruas jalan tol Palimanan-Kanci (Palikanci), ruas jalan tol Kanci-Pajegan.
- d) Wilayah Kabupaten Cirebon dilalui juga oleh jalur Kereta Api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarata, jalur kereta api Cirebon-bandung, jalur kereta api Lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).
- e) Keberadaan pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

B. Kondisi Demografi Kabupaten Cirebon

- a. Kondisi penduduk menurut jenis kelamin

Kabupaten Cirebon Merupakan salah satu kabupaten terpadat di Jawa Barat, penduduk Kabupaten Cirebon terus bertambah, meski demikian dari sensus rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari sensus ke sensus semakin melambat. Pada Tahun 2015 Kabupaten Cirebon berjumlah 2.126.178 jiwa. Hasil sementara dari pengolahan data SP2015-L1.P212, SP2015-C2, dan SP2015-L2 (kondisi 15 juli 2015) sebesar 2.126.178 jiwa dengan komposisi 1.089.692 jiwa penduduk laki-laki dan 1.036.486 jiwa penduduk perempuan.

**Tabel 2.1 jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Cirebon
2015**

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
010. Waled	25,544	26,392	51,936
011. Pasaleman	14,055	16,591	30,646
020. Ciledug	22,484	21,822	44,306
021. Pabuaran	17,607	17,361	34,968
030. Losari	30,186	28,901	59,087
031. Pabedilan	30,033	29,561	59,594
040. Babakan	35,577	34,967	70,544
041. Gebang	32,074	31,347	63,421
050. Karangsembung	18,644	18,020	36,664
051. Karangwareng	15,380	14,656	30,036
060. Lemahabang	27,399	26,196	53,595
061. Susukan Lebak	20,887	19,734	40,621
070. Sedong	22,470	20,984	43,454
080. Astanajapura	40,162	30,099	70,261
081. Pangenan	22,975	21,866	44,841
090. Mundu	36,520	33,998	70,518
100. Beber	21,216	19,255	40,471
101. Greged	29,892	27,727	57,619
111. Talun	34,894	32,691	67,585
120. Sumber	43,991	41,939	85,930
121. Dukupuntang	31,090	29,435	60,525
130. Palimanan	31,749	28,902	60,651
140. Plumbon	34,150	33,519	67,669
141. Depok	31,591	30,535	62,126
150. Weru	28,378	26,313	54,691
151. Plered	25,740	24,407	50,147
161. Tengahtani	19,472	18,521	37,993
162. Kedawung	27,786	27,183	54,969
171. Gunungjati	37,189	36,858	74,047
180. Kapetakan	28,629	27,724	56,353
181. Suranenggala	21,789	21,311	43,100
190. Klangeran	24,589	22,095	46,684
191. Jamblang	19,149	18,864	38,013
200. Arjawinangun	30,814	26,387	57,201
201. Panguragan	23,636	22,161	45,797
Jumlah	1089692	1036486	2,126,178

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon tahun 2015

Menurut tabel diatas hasil dari Sensus Penduduk Indonesia 2015 Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan jumlah penduduknya paling banyak yaitu 43.991 jiwa dan berikutnya adalah Kecamatan Astanajapura yaitu sebanyak 40.162 jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Pasaleman yaitu sebanyak 14.055 jiwa. Sesuai dengan data penduduk terbaru yang sudah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kabupaten Cirebon. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon 15 juli 2015 berjumlah 2.126.178.

C. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Keadaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Cirebon

Ketersediaan infrastruktur jalan menjadi potret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut : Transportasi darat, belum optimalnya tingkat kemantapan jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, terbatasnya fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sisitem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran modal transportasi, dan belum optimalnya jalur pejalan kaki (pedestrian) bagi kenyamanan pada pejalan kaki.

Permasalahan aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi :

- a. Potensi sumber daya air dikabupaten Cirebon cukup terbatas dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industry, dan kebutuhan domestik.
- b. Sistem informasi pengelolaan sumber daya air masih belum memadai.
- c. Menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air masih belum memadai.
- d. Kondisi jaringan irigasi belum memadai karena kondisi infrastruktur mengalami rusak berat dan ringan.

Permasalahan aspek infrastruktur listrik dan energi adalah rasio elektrifikasi rumah tangga belum memadai, belum ada upaya penyediaan sumber energy alternatif pengganti minyak adanya kerentanan kerawanan sumber energy listrik dan gas, menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan/ledeng/pompa. Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik masih rendah belum optimalnya fasilitas pengolahan yang ada.

b. Jumlah Kendaraan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 mencapai 78,31 juta unit, Data Badan Pusat Statistik menunjukkan dari angka tersebut yang paling banyak adalah sepeda motor dengan jumlah 40,88 juta unit (81,5%). Diikuti mobil penumpang dengan jumlah 13,28 juta unit (11,11%), kemudian mobil barang 6,0 juta unit (5,45%), serta mobil bis dengan jumlah 2,4 juta unit (1,99%) dari total kendaraan, berikut adalah tabel jumlah kendaraan bermotor :

Tabel 2.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis pada Tahun 2015

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Presentase (%)
1.	Mobil Barang	6.0 Juta	5, 45%
2.	Mobil Bis	2.4 Juta	1,99%
3.	Mobil Penumpang	13,28 Juta	11,11%
4.	Sepeda Motor	40.88 Juta	81,5%

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Kemudian dari tabel diatas bahwasannya dapat kita ketahui jumlah yang paling banyak dikuasai oleh sepeda motor dengan jumlah 6.0 juta unit, karena rata-rata warga kabupaten Cirebon sangat mengandalkan kendaraan sepeda motor, dan selanjutnya yaitu mobil penumpang jumlahnya mencapai 13.28 unit juta dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menyediakan alat

transportasi untuk masyarakat kabupaten Cirebon seperti jenis (Elef, Angkutan Kota dll).

Kementrian Perhubungan berencana mewajibkan kendaraan pribadi untuk melakukan pengujian kelaikan berkala kendaraan mulai tahun ini. Uji kelayakan ini perlu dilakukan karena semua kendaraan yang menggunakan fasilitas umum harus melakukan keamanan. Sebab banyak kecelakaan kendaraan bermotor terjadi akibat kondisi kendaraan yang tidak layak jalan untuk diperlukan uji kelayakan termasuk kendaraan pribadi. Namun dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor belum memasukan kewajiban untuk kendaraan pribadi.

D. Profil Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon

a. Sejarah Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon

Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari Dinas Daerah dan menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dalam lingkup binamarga berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan. Awal bentuknya Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon pada tahun 1998, karena pada saat itu Dinas Pekerjaan Umum DT.II Cirebon mengalami perubahan dan pemekaran menjadi 3 (tiga) Dinas yaitu

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga.

Pada perjalanannya Dinas Bina Marga masih mengalami beberapa kali perubahan baik nama maupun struktur organisasinya, pada tahun yang sama 1998 Dinas Pekerjaan Umum Binamarga berubah menjadi kantor Bina Marga, pada tahun 2001 berdasarkan perda Kabupaten Cirebon No. 28 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Bina Marga di ubah kembali menjadi Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, dan terakhir mengalami perubahan pada tahun 2008 melau Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas kabupaten Cirebon.

b. Visi Misi Dinas Bina Marga

Visi merupakan gambaran masa depan atau cita-cita yang ingin diwujudkan dari suatu unit kerja. Cita-cita ini mencerminkan gambarann yang menantang tentang keadaan masa depan, diharapkan terwujud dalam kurun waktu 5 Tahun. Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kebinamargaan, memiliki Visi sebagai berikut:

Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon:

“ Terwujudnya seisetm jaringan jalan yang mantap dalam rangka menunjang peningkatan IPM dan pelayanan umum di Kabupaten Cirebon pada tahun 2014”

Untuk dapat mewujudkan Visi Organisasi tersebut, setiap unit kerja tentunya harus menetapkan dan memiliki Misi yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Rumusan Misi ini merupakan pernyataan alasan keberadaan organisasi, menjadi tonggak dari penyusunan Rencana Strategis dan sebagai landasan kerja organisasi. Dengan adanya Misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal secara lebih baik alasan keberadaan dan peranan suatu unit kerja.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkanlah Misi Dinas Bina Marga, sebagai berikut:

Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon :

1. Memberikan Pelayanan prima di bidang kebinamargaan kepada masyarakat, yang didukung oleh aparatur yang bersih dan terbuka.
2. Menyelenggarakan pelaksana program kebinamargaan yang tepat guna dan berhasil guna.

c. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon

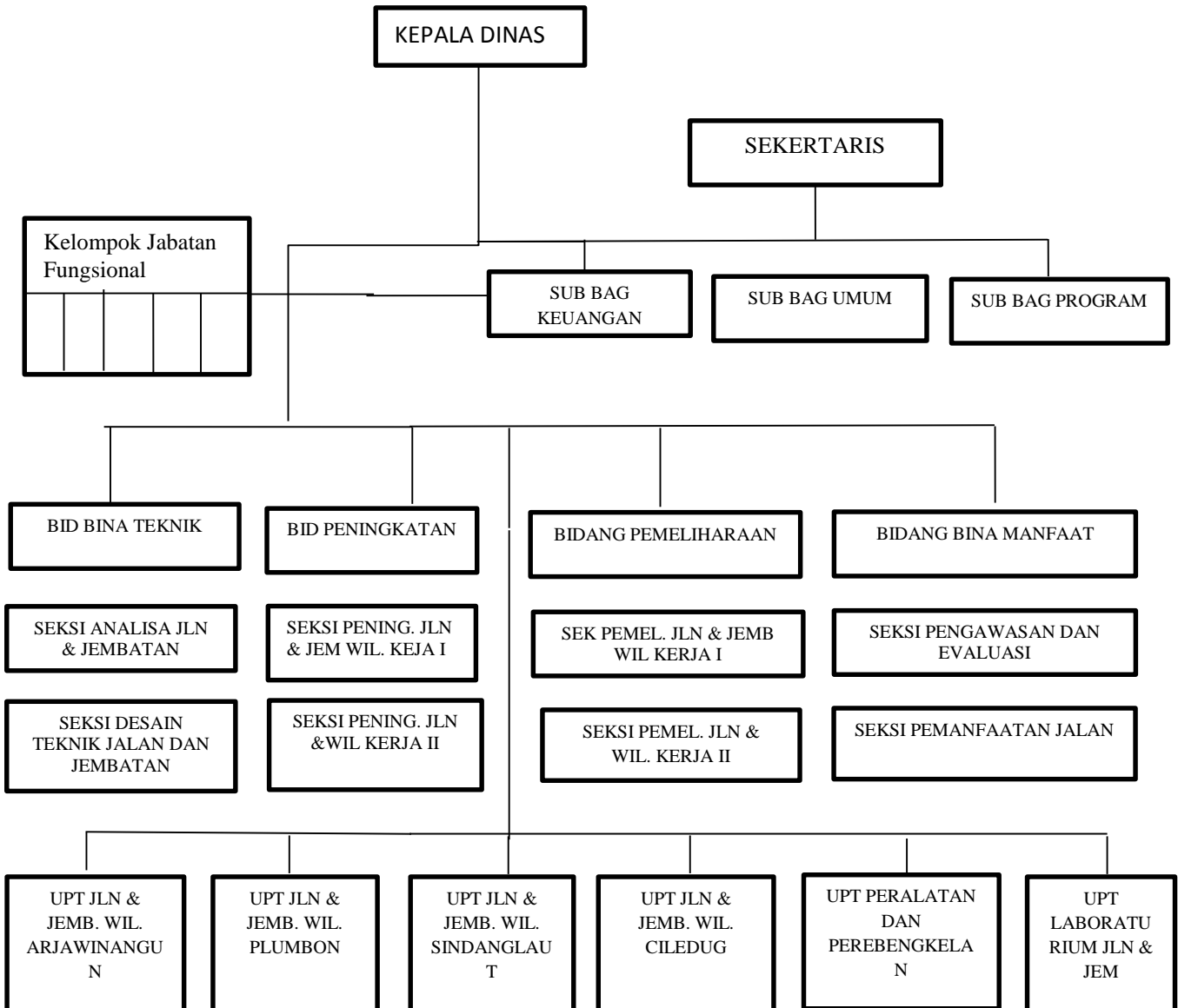
Pembentukan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon ditetapkan melalui Peraturandaerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun tentang Pembentukan Organisasi Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas

- Sekretariat
- Bidang Bina Teknik
- Bidang Peningkatan
- Bidang Pemeliharaan
- Bidang Bina Manfaat
- UPT terdiri dai UPT Arjawinangun, UPT Sindanglaut, UPT Ciledug, UPT Plumbon, UPT Peralatan dan Perbengkelan, UPT Laboratorium.

Diatas dalah sub-sub bagian Dinas Bina Marga kabupaten Cirebon, berikut Struktur Organisasi.

STRUKTUR ORGANISSASI



d. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup kebinamargaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang “Organisasi Perangkat Daerah”, maka ditetapkan PERDA Nomor 5 Tahun 2008 tentang “Pembentukan Organisasi Dinas Daerah “ (Lembaran Daerah Kab. Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4) Dinas Bina Marga, dengan susunan organisasi yaitu :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, yang membawahi Sub. Bagian Umum, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Program.
- Bidang Bina Teknik, yang membawahi Seksi Analisa Jalan dan Jembatan, Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan.
- Bidang Peningkatan, yang membawahi Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja I, Seksi Peningkatan, Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja II.
- Bidang Pemeliharaan, yang membawahi Seksi Pemeliharaan Jalan dan

- Jembatan Wilayah Kerja I, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja II.
- Bidang Bina Manfaat, yang membawahi Seksi Pengawasan dan Evaluasi, Seksi Pemanfaatan Jalan.
- UPT terdiri dari UPT Arjawinangun, UPT Sindanglaut, UPT, Ciledug UPT Plumbon, UPT Peralatan dan Perbengkelan, UPT Laboratorium.

Tugas Pokok DBM : menyelenggarakan sebagian urusan pemberitahuan daerah dibidang pekerjaan umum dalam lingkup kebinamargaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang umum dalam lingkup kebinamargaan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dalam lingkup kebinamargaan.
- c. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas.
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, peningkatan, pemeliharaan, dan bina manfaat.
- e. penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Program Kinerja Bina Marga kabupaten Cirebon

Indikator kinerja tersebut diimplementasikan kedalam program-program. Berbeda dengan tahun sebelumnya, maka Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon menetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program pembangunan sistem perencanaan sektoral
6. Program pembangunan jalan dan jembatan
7. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
8. Program rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan
9. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
10. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
11. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
12. Program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.